



Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi, Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatra Utara

Santi Monika Sagala^{1*}, Puti Andiny², Safuridar Safuridar³, Yani Rizal⁴

¹⁻⁴Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Samudra, Langsa – Aceh, Indonesia

santimonikasagala@gmail.com^{1*}, putiandiny@unsam.ac.id², safuridar@unsam.ac.id³, yanirizal@unsam.ac.id⁴

Korespondensi penulis: santimonikasagala@gmail.com*

Abstract. This research aims to analyze the influence of government spending, economic growth and inflation on poverty levels in North Sumatra Province during the 2014-2023 period. Using a quantitative approach with secondary data from the Central Statistics Agency (BPS), this research applies multiple linear regression analysis to identify the variables that have the most influence on poverty. The results of the analysis show that increased government spending, recovered economic growth, and good inflation management contributed significantly to reducing poverty levels, with government spending increasing from 7,808.56 billion rupiah in 2014 to 14,323.52 billion rupiah in 2023. Model The regression shows that these variables influence poverty by 70.19%, while 29.81% is influenced by other factors. This research emphasizes the importance of monitoring and adjusting economic policies to achieve the goal of poverty alleviation more effectively.

Keywords: Government Expenditure, Economic Growth, Inflation, Poverty Level.

Abstrak. Penelitian ini dilakukan guna menganalisis pengaruh infrastruktur Listrik dan infrastruktur sosial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh bagaimana pengaruh infrastruktur Listrik, Kesehatan dan Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Analisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan Regresi Linear Berganda. Jenis data penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur Listrik yang terdapat nilai probabilitasnya yaitu sebesar $0,2855 > 0,05$ tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. infrastruktur kesehatan yang terdapat nilai probabilitasnya yaitu sebesar $0,5845 > 0,05$ tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. infrastruktur pendidikan yang terdapat nilai probabilitasnya yaitu sebesar $0,3478 > 0,05$ tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan variabel Listrik, Kesehatan dan Pendidikan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Kata kunci: Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Kemiskinan.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan berlapis-lapis, yang terus menjadi tantangan bagi banyak negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Sumatera utara, situasi ini semakin mendesak mengingat tingginya tingkat kemiskinan yang masih ada, meskipun telah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah untuk mengatasinya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS 2023), angka kemiskinan di Sumatra Utara berada pada level yang mengkhawatirkan, dengan banyak masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam konteks ini, belanja negara berperan penting sebagai salah satu instrumen utama untuk meningkatkan kualitas warga negara. Dengan fokus pada peningkatan alokasi anggaran untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan dan belanja ini, diharapkan pengeluaran tersebut dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja,

kualitas hidup penduduk, dan memperkuat akses terhadap layanan dasar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), “bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk meningkatkan belanja publik di bidang-bidang strategis,” yang menunjukkan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif.

Pertumbuhan ekonomi Sumut dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan variasi yang signifikan, terutama akibat dampak dari pandemi COVID-19. Sebelum terjadinya pandemi, pertumbuhan ekonomi di kawasan ini relatif stabil, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2020. Pemulihan ekonomi pascapandemi menjadi tantangan besar bagi pemerintah, yang harus memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak selalu menjamin penurunan tingkat kemiskinan jika tidak didukung oleh kebijakan yang seimbang. Dalam laporan Kementerian Keuangan (Republik Indonesia 2022) disebutkan, “Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sangat penting untuk menurunkan angka kemiskinan, terutama di daerah yang terkena dampak langsung oleh krisis ekonomi”. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan ekonomi harus dipadukan dengan kebijakan yang berkaitan dengan pembagian manfaat agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan dampak positif terhadap pertumbuhan tersebut.

Inflasi juga merupakan faktor kunci yang tidak dapat diabaikan dalam konteks kemiskinan. Meningkatnya harga barang dan jasa mengikis daya beli individu, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah. Dalam konteks Sumut, fluktuasi inflasi harus dicermati dengan cermat, karena dapat berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kenaikan harga yang tidak terkendali dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat miskin dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Oleh karena itu penting untuk menganalisis cara inflasi berinteraksi dengan belanja publik dan pertumbuhan ekonomi dalam konteks pengentasan kemiskinan. (Bank Indonesia 2023) mengungkapkan bahwa stabilitas harga sangat diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat yang merupakan kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menekankan pentingnya pengelolaan inflasi yang efektif guna meningkatkan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Penelitian yang dilakukan oleh (Daniel, Hwan, Purba, Nico, & Simamora, Novia. 2023). bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Memahami interaksi antara ketiga faktor ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan di daerah tersebut. melalui pendekatan yang holistik dan

terpadu, kami harapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik, yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya. Dengan cara ini, diharapkan Sumatera Utara dapat mencapai kemajuan yang lebih besar mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Tabel 1: Data pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, Inflasi, dan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara (2014-2023)

Tahun	Pengeluaran pemerintah	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)	Tingkat kemiskinan (%)
2014	7.808,56	5,23	8,17	9,85
2015	7.959,17	5,10	3,24	10,53
2016	9.476,42	5,18	6,34	10,35
2017	12.518,86	5,17	3,20	10,22
2018	12.563,39	5,18	1,23	9,22
2019	13.440,32	5,22	2,33	8,83
2020	12.653,60	-1,07	1,96	8,75
2021	13.225,39	2,61	1,71	9,01
2022	12.649,62	4,73	6,12	8,42
2023	14.323,52	5,01	2,25	8,15

Sumber :BPS provinsi Sumatera Utara, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1, data yang disajikan menunjukkan gambaran menyeluruh tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara selama periode 2014 hingga 2023. Dalam konteks ini, pengeluaran pemerintah menjadi salah satu alat utama yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Pada tahun 2014, pengeluaran pemerintah tercatat sebesar 7.808,56 miliar rupiah, dan angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencapai 14.323,52 miliar rupiah pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta melaksanakan berbagai program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan pengeluaran di sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, diharapkan pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah yang meningkat dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di Sumatera Utara.

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara menunjukkan variasi yang signifikan selama enam tahun terakhir ini. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,23%, yang menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif stabil dan memberikan harapan untuk pengurangan tingkat kemiskinan. Namun, pada tahun 2020, perekonomian mengalami penurunan drastis

dengan angka -1,07%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dampak besar dari pandemi COVID-19, yang mengganggu banyak sektor, termasuk perdagangan, pariwisata, dan usaha kecil. Meskipun mengalami penurunan yang tajam, pertumbuhan ekonomi mulai pulih pada tahun 2021, dengan angka 2,61%, dan meningkat lagi menjadi 5,01% pada tahun 2023. Pemulihan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi mulai membuahkan hasil, yang berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan.

Inflasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Selama periode yang dianalisis, tingkat inflasi menunjukkan fluktuasi yang cukup mencolok. Inflasi tertinggi tercatat pada tahun 2014, mencapai 8,17%, yang menandakan adanya tekanan inflasi yang signifikan pada saat itu. Di sisi lain, inflasi terendah terjadi pada tahun 2018, dengan angka hanya 1,23%, menunjukkan kondisi ekonomi yang lebih stabil. Namun, inflasi kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 6,12%, mencerminkan tantangan dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Kenaikan inflasi ini dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok dengan pendapatan rendah, sehingga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan pemerintah agar tidak mengganggu upaya pengurangan kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di Sumatra Utara menunjukkan tren penurunan yang positif selama periode ini. Pada tahun 2014, tingkat kemiskinan tercatat di angka 9,85%, tetapi secara bertahap menurun menjadi 8,15% pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan, termasuk peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program bantuan sosial. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat peningkatan kecil pada tahun 2021, di mana tingkat kemiskinan mencapai 9,01%. Kenaikan ini mungkin disebabkan oleh dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang memengaruhi pendapatan dan akses masyarakat terhadap pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, tantangan dalam mengurangi kemiskinan masih tetap ada dan perlu diatasi terus-menerus.

Secara keseluruhan, data dalam Tabel.1 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang meningkat, pertumbuhan ekonomi yang pulih, dan pengelolaan inflasi yang baik dapat berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan di Sumatra Utara. Dengan pengeluaran pemerintah yang meningkat dari 7.808,56 miliar rupiah pada tahun 2014 menjadi 14.323,52 miliar rupiah pada tahun 2023, serta pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan, ada harapan bahwa tingkat kemiskinan dapat terus berkurang. Namun, tantangan inflasi yang fluktuatif harus dikelola dengan baik untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Ke depan, penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan menyesuaikan kebijakan

ekonomi agar dapat mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara lebih efektif. Ini termasuk memperkuat program-program sosial, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menyerap tenaga kerja. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, diharapkan Sumatera Utara dapat mencapai kemajuan yang lebih dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk layak hidup (BPS 2012). Selain itu diindikasikan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan yang di bawah ambang batas standar kebutuhan minimum, baik untuk kebutuhan pangan maupun non pangan, yang disebut garis kemiskinan (*Proverty threshold*) (Novita Dewi, 2017). Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi kekurangan barang-barang umum seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air bersih. Kemiskinan terkadang juga berarti kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang dapat mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan rasa horma yang layak anda dapatkan sebagai warga negara. Kemiskinan adalah masalah global (Arfiani, 2009)

Kemiskinan adalah rendahnya taraf hidup atau sesuatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk mencapai standar hidup rata-rata penduduk disuatu wilayah. Keadaan ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhandasar dalam hal sandang dan perumahan. Kapasitas masyarakat berpendapatan yang rendah ini juga akan berdampak pada berkurangnya kapasitas dalam mencapai taraf hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan pendidikan. Kemiskinan merupakan permasalahan inti dari sebuah perekonomian negara. Penelitian yang dilakukan oleh (Yusnuri & Abubakar 2023) menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan di Indonesia akan memberikan dampak yang besar dan menguntungkan terhadap PDB negara tersebut.

Secara konseptual, kemiskinan dirumuskan sebagai suatu kondisi hidup yang tidak memungkinkan terpenuhi kebutuhan dasar manusia. secara operasional, kemiskinan ditentukan dengan menggunakan garis kemiskinan sebagai acuan. Untuk menentukan garis kemiskinan, perlu ditentukan suatu batas kebutuhan minimum yang memungkinkan masyarakat dapat hidup dengan layak yang meliputi total pendapatan, pengeluaran konsumsi, kebutuhan kalori, dan lain-lainnya, yang dapat digunakan sebagai titik awal perhitungan.

Menurut Khomsam (2015), Indonesia memiliki tiga ciri kemiskinan yang menonjol. Pertama, terdapat banyak rumah tangga yang berada dekat dengan ambang batas kemiskinan nasional, mengakibatkan sejumlah besar penduduk yang, meskipun termasuk dalam kelompok miskin, tetap memiliki risiko kemiskinan. Kedua, pengukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, yang tidak selalu merefleksikan sepenuhnya kondisi kemiskinan yang sebenarnya. Banyak individu yang terklasifikasi sebagai miskin sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan akses ke layanan dasar serta indikator-indikator rendah dalam pembangunan manusia. Ketiga, mengingat keragaman dan cakupan geografis Indonesia yang luas, perbedaan antar wilayah menjadi karakteristik utama dari kemiskinan di negara Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk yaitu:

- 1) Kemiskinan Absolut, yaitu pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, dan kesehatan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup keberlanjutan.
- 2) Kemiskinan Relatif, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitar.
- 3) Kemiskinan Kultural, yaitu mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- 4) Kemiskinan Struktural, yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi menyebabkan suburnya kemiskinan.

Pengeluaran Pemerintah

Menurut belanja publik, alokasi anggaran oleh pemerintah pada sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk. Menurut (Musgrave 1959), pengeluaran publik tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mendistribusikan kembali pendapatan dan menyediakan barang publik. Dengan meningkatkan belanja di sektor pendidika misalnya, pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya

manusia, yang berdampak langsung pada produktivitas kerja. Pendidikan yang baik membuka kesempatan kerja yang lebih baik, sehingga membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Investasi publik di bidang infrastruktur juga sangat penting. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi, memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses yang lebih besar terhadap pasar dan layanan dengan lebih mudah. Hal ini sangat terutama terjadi di Sumatera Utara, di mana beberapa daerah masih mengalami kesulitan dalam hal aksesibilitas. Dengan meningkatkan belanja di bidang infrastruktur, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan mobilitas masyarakat, yang akhirnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Kementerian Keuangan, 2022).

Selain itu, belanja pemerintah juga berfungsi sebagai penyangga di saat situasi krisis. Misalnya, dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah mungkin meningkatkan pengeluaran untuk program perlindungan sosial dan bantuan tunai langsung. Upaya ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat khususnya di kalangan kelompok rentan, guna mengurangi dampak negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian, belanja pemerintah yang terencana dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat mempunyai potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan di Sumatera Utara.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Untoro (2010:39), pertumbuhan ekonomi adalah berkembang kegiatan dalam perekonomian yang mengakibatkan bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan bertambahnya kesejahteraan masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Kuznets (dalam Sukirno, 2006:132), pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang- barang ekonomi kepada penduduknya.

Menurut Rudriger (2006:112), produk domestik bruto/PDB berarti mengukur nilai pasar dari barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi oleh negara-negara yang berada di suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDB juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat. Jadi, PDB adalah pendapatan total dan total pengeluaran untuk produk barang dan selama periode tertentu. PDB ini dapat mencerminkan kinerja perekonomian, sehingga semakin tinggi PDB suatu negara, maka dikatakan semakin baik pula kinerja perekonomian di negara tersebut. Peranan PDB di dalam suatu perekonomian sehingga

perlu untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi PDB (Arsyad, 2004:45).

inflasi

Menurut Zakaria (2013) dalam Murtala (2020) inflasi adalah suatu peristiwa yang terjadi dan keadaan dimana harga barang meningkat dan nilai tukar melemah. Inflasi akan menurunkan harga saham di pasar. Pada saat yang sama inflasi yang rendah dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi dan akhirnya harga saham akan bergerak dengan lambat. Namun, jika kenaikan harga hanya dari satu atau dua kali, kita tidak membicarakan inflasi, kecuali jika inflasi tersebut digeneralisasikan atau menyebabkan peningkatan tajam pada barang-barang lain. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum suatu barang secara terus menerus (Nopirin, 2009).

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu peningkatan permintaan atau peningkatan biaya produksi. Inflasi yang mendorong oleh permintaan (*demand pull inflation*) dimulai dengan peningkatan permintaan total (*aggregate demand*) ketika produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati lapangan kerja penuh. Akibat adanya permintaan total yang berlebihan, harga produksi meningkat (*output*). Inflasi akibat tekanan biaya (*Cost-push inflation*) biasa umumnya terjadi melalui kenaikan biaya produksi (*input*) dan penurunan produksi. Hal ini menyebabkan kenaikan produk (*output*) yang dihasilkan ikut naik (Indriyani, 2016).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif, yang pada berfokus pada penggunaan data numerik yang untuk dianalisis menggunakan metode statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berbentuk time series periode 2014-2023, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Teknik analisis yang diterapkan meliputi Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi), regresi linear berganda, serta uji signifikansi (koefisien determinasi (R^2), Uji F, dan Uji t). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel mana yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan.

Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda, yang bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel independen seperti pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan.

Sebelum memvalidasi model regresi, penting untuk memenuhi Uji Asumsi Klasik terlebih dahulu (Sugiyono, 2013). Secara matematis, bentuk persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + et.....$$

Keterangan :

- Y = Kemiskinan
- α = Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = koefisien regresi
- X_1 = Pengeluaran Pemerintah
- X_2 = Pertumbuhan Ekonomi
- X_3 = Inflasi
- e = error term

Uji Asumsi Klasik

Untuk menentukan data dan mendapatkan persamaan regresi yang valid untuk prediksi, penelitian ini akan melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji Signifikansi

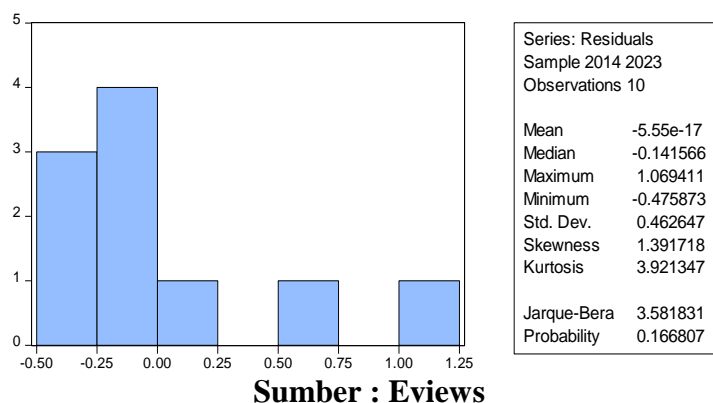
Uji hipotesis yang di lakukan pada penelitian ini yaitu uji parsial, uji simultan dan koefisien determinasi (R^2).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas



Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah nilai residual yang telah distandarisasi dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Salah satu cara untuk melakukan uji ini adalah melalui analisis grafik normal probability plot. Dalam pendekatan ini, nilai residual dianggap terdistribusi normal jika titik-titik yang merepresentasikan data mengikuti atau mendekati garis diagonal. Berdasarkan hasil uji, nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar $3,581831 > 0,05$ menunjukkan bahwa residual data penelitian terdistribusi normal (Lolos Uji Normalitas).

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors			
Date: 11/20/24 Time: 17:24			
Sample: 2014 2023			
Included observations: 10			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	2.389766	74.43287	NA
X1	1.13E-08	49.78536	1.749513
X2	0.010097	6.790338	1.160660
X3	0.010756	6.070281	1.895686

Sumber : Eviews

Berdasarkan hasil Uji Multikolinearitas diatas menunjukan bahwa nilai Centered VIF < 10 , maka dapat di simpulkan bahwa data terbebas dari masalah multikolinearitas

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	0.226916	Prob. F(3,6)	0.8745
Obs*R-squared	1.018971	Prob. Chi-Square(3)	0.7967
Scaled explained SS	0.535818	Prob. Chi-Square(3)	0.9110

Sumber : Eviews

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan metode Breusch-Pagan-Godfrey, nilai probabilitasnya adalah $0,7967 > 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.725868	Prob. F(2,4)	0.5383
Obs*R-squared	2.662887	Prob. Chi-Square(2)	0.2641

Sumber : Eviews

Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi di atas dapat di lihat bahwa prob 0,5383 > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model penelitian ini.

e. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 11/20/24 Time: 17:21				
Sample: 2014 2023				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.51134	1.545887	8.740185	0.0001
X1	-0.000352	0.000106	-3.303296	0.0163
X2	0.087141	0.100483	0.867223	0.4191
X3	-0.125992	0.103712	-1.214825	0.2701
R-squared	0.701993	Mean dependent var	9.333000	
Adjusted R-squared	0.552990	S.D. dependent var	0.847494	
S.E. of regression	0.566624	Akaike info criterion	1.990934	
Sum squared resid	1.926380	Schwarz criterion	2.111968	
Log likelihood	-5.954672	Hannan-Quinn criter.	1.858160	
F-statistic	4.711253	Durbin-Watson stat	1.311525	
Prob(F-statistic)	0.050981			

Sumber :

Eview

$$\text{Kemiskinan} = 13,51134 - 0,000352 X_1 - 0,087241 X_2 + -0,125992 X_3$$

1. Nilai konstanta sebesar 13,51134 menunjukkan jika variabel pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, inflasi, berpengaruh konstan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi sumatra utara sebesar 13,51134
2. Hasil estimasi koefisien variabel pengeluaran pemerintah (X_1) sebesar -0,000352 dan signifikan pada prob $0,0163 < \alpha = 0, 05$. Artinya pengeluaran pemerintah (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y) jika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah (X_1) sebesar 1 persen , maka tingkat kemiskinan

(Y) di provinsi sumatra utara akan menurun secara signifikan sebesar 0,0163 persen, *ceteris paribus*.

3. Hasil estimasi koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (X_2) sebesar 0,087141 dan tidak signifikan pada prob $0,4191 < \alpha = 0,05$. Artinya pertumbuhan ekonomi (X_2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y) jika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi (X_2) sebesar 1 persen, maka tingkat kemiskinan (Y) di provinsi sumatra utara akan meningkat secara tidak signifikan sebesar 0,087141 persen, *ceteris paribus*.
4. Hasil estimasi koefisien variabel inflasi (X_3) sebesar 0,125992 dan tidak signifikan pada prob $0,2701 < \alpha = 0,05$. Artinya inflasi (X_3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y) jika terjadi peningkatan inflasi (X_3) sebesar 1 persen, maka tingkat kemiskinan (Y) di provinsi sumatra utara akan menurun secara tidak signifikan sebesar 0,087141 persen, *ceteris paribus*.

Uji Signifikas

Berdasarkan hasil regresi, nilai signifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen (Y), sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Berdasarkan hasil regresi sebelumnya menggunakan Regresi Linear Berganda, nilai R-square dalam penelitian ini adalah 0,701993, atau 70,19%, artinya variabel pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan inflasi mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatra Utara sebesar 70,19% sedangkan sisanya sebesar 29,81% di pengaruhi oleh faktor-faktor variabel lain diluar penelitian ini seperti pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kemiskinan.

2. Uji Simultan (Uji-F)

Untuk menguji hipotesis pengaruh simultan dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), digunakan uji F-statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Prob (F-Statistic) sebesar 0,050981 di mana nilai ini berada tepat di ambang 0,05. Maka dapat di nyatakan secara simultan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, inflasi tidak berpengaruh signifikasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra Utara.

3. Uji Parsial (Uji-T)

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, digunakan uji t-statistik. Uji parsial ini bertujuan untuk

menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian parsial menyatakan bahwa jika nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansi, yaitu 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan; sebaliknya, jika lebih dari 0,05, maka tidak signifikan.

- a) Nilai t hitunglah variabel pengeluaran pemerintah sebesar -3,303296 dengan probabilitas 0,0163 berpengaruh signifikan pada 5%. Jadi dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
- b) Nilai t hitung variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,867223 dengan probabilitas 0,4191 tidak signifikan pada 5%. Jadi dapat diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
- c) Nilai t hitung variabel inflasi sebesar -1,214825 dengan probabilitas 0,2701 tidak signifikan pada 5%. Jadi dapat diketahui bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan analisis data statistik dan pembahasan berdasarkan teori yang ada serta fenomena yang terkait, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil uji hipotesis parsial pada penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Artinya hipotesis mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di daerah tersebut terbukti benar. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di sumut sudah mampu mengakses pembangunan dengan baik. Selain itu, belanja pemerintah mencerminkan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di provinsi tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Indrianti Sulistria Ningsing dkk (2022), Isabella Calina Ketaren (2018) menyimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Sukirno (2004), yang menyatakan bahwa belanja tersebut akan meningkatkan belanja keseluruhan dan meningkatkan peningkatan aktivitas pekonomi dalam negeri.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskina

Hasil uji hipotesis parsial pada penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan di Sumatera Utara, pengaruh tersebut tidak signifikan. Ini berarti bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat,

kemiskinan juga cenderung meningkat. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi menurun maka kemiskinan cenderung menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Bregstorm (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dominan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, namun kebijakan terkait pengurangan ketimpangan mempunyai potensi lebih besar. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, hal juga sejalan dengan penelitian Vania GS dkk (2021) serta penelitian Ari Kristin dan Sulia Sukmawati (2018). *Teori trickle down effect* tidak berlaku di banyak provinsi di Indonesia. Situasi ini diperburuk oleh pandemi yang menyebabkan pada kontraksi dan pelemahan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan jumlah penduduk miskin.

Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil uji hipotesis secara parsial padapenelitian ini menunjukkan bahwa inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan. Artinya, meskipun inflasi mungkin berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan, dampaknya tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan dalam konteks penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Endrayani dan Dewi (2016), Ningsih dan Andiny (2018), Primandari (2018), dan Mardiatillah dkk (2019). berbagai penelitian empiris yang menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama kemiskinan adalah inflasi. Kenaikan harga yang terus-menerus akan menyebabkan penurunan pendapatan riil masyarakat, yang akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat rendah. Ketika daya beli yang rendah, maka tingkat konsumsi individu juga rendah. Rendahnya daya beli dan rendahnya tingkat kesejahteraan ini akan berdampak besar terhadap menurunnya tingkat kesejahteraan yang diperlukan untuk mencapai taraf hidup yang layak. Tentu saja jika harga produk primer naik maka garis kemiskinan akan meningkat, yang pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal ini diperkuat dengan pandangan Mankiw (2003) bahwa peningkatan inflasi tentunya akan meningkatkan ambang batas inflasi. Ketika tingkat inflasi berfluktuasi dan nilai mata uang berfluktuasi sangat tajam, maka kenaikan inflasi pada gilirannya akan diikuti dengan kenaikan ambang batas garis kemiskinan sebagai akibat kenaikan laju inflasi, yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil uji parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel C (Intercept) dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen kemiskinan, sementara variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Nilai t-statistic dan probabilitas yang diperoleh menegaskan bahwa hanya pengeluaran pemerintah yang memberikan dampak nyata pada kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak memberikan kontribusi yang cukup untuk mempengaruhi hasil. Temuan ini mengindikasikan pentingnya fokus pada variabel-variabel yang signifikan dalam merancang kebijakan atau strategi, serta perlunya mempertimbangkan kembali relevansi variabel yang tidak signifikan dalam konteks penelitian ini.

Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran dalam sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, meskipun pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam penelitian ini, kedua variabel tersebut tetap perlu diperhatikan dalam konteks jangka panjang. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji bagaimana pengeluaran pemerintah dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengendalikan inflasi. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas program pengeluaran pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan efisien dan berdampak positif pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian panduan ini, khususnya kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah Penulisan Karya Ilmiah dan Workshop Ekonomi Publik di Universitas Samudra, yang memungkinkan jurnal ini diterbitkan.

DAFTAR REFERENSI

- Azmi, R. M. T., & Panjawa, J. L. (2022). Pengaruh pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 2(6), 127-140.
- Daniel, H., Purba, N., & Simamora, N. (2023). The effect of economic growth, open unemployment rate and human development index on poverty in North Sumatra. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 2(5), 391-402.
- Dewi, N., Yusuf, Y., & Iyan, R. Y. (2017). Pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau (Doctoral dissertation, Riau University).
- Endrawati, D., Nujum, S., & Selong, A. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, rasio Gini dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan Indonesia 2017-2022. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 20144-20151.
- Fadly, F., Inat, F., Iryanto, M., & Quilim, C. A. (2021). Analisis pengaruh pembiayaan bank syariah, belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Ternate. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 123-129.
- Indriyani, S. (2016). Analisis pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2005–2015. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 4(2), 1-11.
- Khomsan, A., Dharmawan, A. H., Sukandar, D., & Syarief, H. (2015). Indikator kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Murtala, A. A., & Akindele, A. J. (2020). Anxiolytic- and antidepressant-like activities of hydroethanol leaf extract of *Newbouldia laevis* (P. Beauv.) Seem. (Bignoniaceae) in mice. *Journal of Ethnopharmacology*, 249, 112420.
- Nasution, R. A., Silaban, S. J., & Humairah, Z. (2023). Analisis pengaruh belanja pemerintah, pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 206-225.
- Sinaga, R. V. I. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Se Sumatera. *Jurnal Implementasi Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1).
- Sudirman, A., Kusuma, R. C. S. D., Halim, F., & Sembiring, L. D. (2024). Analysis of the mediation effect of green competitive advantage: Reviewing the influence of green innovation on SMEs' business performance. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(2), 2617-2627.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Syahputra, R. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 183-191.
- Yusnuri, R. A., & Abubakar, J. (n.d.). Analysis of human development index, unemployment and poverty on economic growth in Indonesia.